

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PERAHU FIBER OLEH
DINAS PERIKANAN KOTA PADANG DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN NELAYAN**

SKRIPSI

*“Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)”*



Oleh :

VERSY APRILIA

17042262

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pemberian Bantuan Perahu Fiber Oleh
Dinas Perikanan Kota Padang Dalam Rangka
Pemberdayaan Nelayan

Nama : Versy Aprilia

NIM / TM : 17042262/2017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

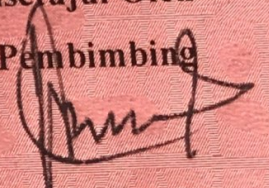
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Agustus 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 10:00 WIB s/d 11:00 WIB

**Efektivitas Pemberian Bantuan Perahu Fiber Oleh Dinas Perikanan Kota
Padang Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan.**

Nama : Versy Aprilia
TM/NIM : 2017/17042262
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2021

Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Versy Aprilia
NIM/TM : 17042262/2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemberian Bantuan Perahu Fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan" adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Agustus 2021
Saya yang menyatakan,



Versy Aprilia
17042262/2017

ABSTRAK

VERSY APRILIA

17042262/2017

EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PERAHU FIBER OLEH DINAS PERIKANAN KOTA PADANG DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN NELAYAN

Artikel ini bertolak dari permasalahan yang hadapi oleh nelayan. Permasalahan yang dihadapi adalah kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat sudah sering dilakukan oleh pemerintah namun kebijakan tersebut belum bisa meningkatkan pendapatan atau taraf hidup nelayan. Salah satu kebijakan yang diberikan kepada nelayan adalah pemberian bantuan perahu fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Dinas Perikanan Kota Padang, penyuluh perikanan, nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama, nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok usaha bersama di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan perahu fiber belum efektif karena tidak tepat sasaran, tepat target, tepat kebijakan dan tepat lingkungan. hal tersebut berakibat bantuan yang diberikan belum bisa meningkatkan pendapatan nelayan, sehingga tidak bisa meningkatkan penghasilan dan kemandirian nelayan.

Keyword :Efektivitas, perahu, pemberdayaan, nelayan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pemberian Bantuan Perahu Fiber Oleh Dinas Perikanan Kota Padang Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan selaku dosen pembimbing akademik
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP. MA dan Bapak Rahmadani Yusran, S.sos. M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf Dinas Perikanan Kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. *Last but not least*, teristimewa juga kepada “*fanbeviez*” terimakasih banyak untuk haha hihi nya, Alhamdulillah kita bisa sama-sama sampai di titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk pembaca. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 17 Agustus 2021

Penulis

Versy Aprilia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA	
PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi7
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Efektivitas Kebijakan	8
2. Indikator Efektivitas Kebijakan	12
3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas	16
4. Perahu Fiber.....	18
5. Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberian Bantuan Perahu Fiber	20
6. Pemberdayaan Nelayan	21
B. Penelitian yang Relevan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	37

D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	39
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
a. Temuan Umum.....	42
B. Temuan Khusus.....	50
C. Pembahasan.....	69
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kelompok KUB Penerima Bantuan Perahu Fiber.....	3
Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rancangan umum Perahu Fiber	19
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Padang Kota Padang ..	47
Gambar 3.1 Gambar Perahu Fiber.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki luas lautan lebih banyak dari pada daratan. Secara geografis Indonesia memiliki 2.027.087 km² daratan dan 6.166.165 km² wilayah perairan. Dari luas perairan tersebut, meliputi 0,3 juta km teritorial 2,8 juta km perairan kepulauan dan ZEE seluas 2,7 juta km (Suryo 2014:40). Sumatera Barat termasuk kedalam salah satu daerah di Indonesia memiliki wilayah pesisir. Dan penduduk Sumatera Barat banyak bermatapencaharian sebagai nelayan. Nelayan sering dikaitkan dengan kehidupan yang kurang memadai atau bisa dikatakan bahwa nelayan identik dengan kata kemiskinan.

Pada tahun 2015 Walikota Padang mengeluarkan surat keputusan no 485 tahun 2015 tentang nelayan penerimaan bantuan sarana penangkapan ikan. Bantuan yang disalurkan tersebut disalurkan melalui Dinas Perikanan Kota Padang. Pada tahun 2019 Walikota Padang juga mengeluarkan surat keputusan no 142 tahun 2019 tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap, Surat keputusan Walikota Padang ini masih berlaku sampai saat sekarang ini. Salah satu bantuan yang diberikan adalah bantuan perahu fiber. Berdasarkan informasi ibu Zermalsia selaku staf Bidang Tangkap di Dinas Perikanan Kota Padang menjelaskan bahwa program bantuan tersebut terbentuk karena ada beberapa kendala dari nelayan, maka dari itu terbentuklah program bantuan untuk mengatasi kendala yang

dihadapi oleh nelayan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh nelayan kota Padang banyak yang menyangkut tentang kapal seperti susahnya nelayan mendapatkan kayu dan alat tangkap yang nelayan miliki tidak boleh lagi digunakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2017 memiliki tujuan pemberian bantuan yaitu bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan, meningkatkan jumlah kapal perikanan yang berkualitas, meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan, meningkatkan mutu hasil tangkapan, meningkatkan pendapatan nelayan.

Dinas Perikanan Kota Padang memberikan program bantuan berupa perahu fiber yang boleh digunakan oleh para nelayan untuk melaut. Dengan adanya bantuan perahu fiber dapat membantu nelayan di Kota Padang dalam melaut. Berdasarkan informasi ibu Zermalsia selaku staf Bidang Tangkap di Dinas Perikanan Kota Padang program bantuan perahu fiber ini sudah ada sejak tahun 2018.

Dibawah ini dicantumkan tabel tentang bantuan perahu fiber yang sudah diberikan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kota Padang.

Tabel 1.1

Data KUB Penerima Bantuan Perahu Fiber di Kota Padang

Tahun	Nama KUB penerima bantuan	Lokasi	Unit
2018	KUB Cahaya Laut	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	1
	KUB Carolina		2
2019	KUB Robin Gauang	Kecamatan Lubuk Begalung	2
	KUB Sepakat Bersama		2
2019	KUB Lobster Sitinurbaya	Kecamatan Padang Selatan	1
	KUB Lumba-Lumba Putih		1
2020	KUB Batu Berantai	Kecamatan Padang Selatan	1

Sumber: Dinas Perikanan Kota Padang

Untuk mendapatkan bantuan perahu fiber nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) harus mengajukan proposal ke Dinas Perikanan Kota Padang terkait dengan bantuan perahu fiber. Akan tetapi masyarakat masih belum memahami bagaimana kriteria pengajuan untuk mendapatkan bantuan perahu fiber, sehingga setelah dilakukan pengajuan proposal nelayan belum tentu dapat menerima bantuan tersebut. Berdasarkan informasi dari ibu Zermalsia selaku staf Bidang Tangkap di Dinas Perikanan Kota Padang mengatakan bahwa proposal yang diajukan oleh nelayan kepada Dinas Perikanan belum tentu semua akan diterima dan itu harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pembagian bantuan perahu fiber yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Padang kepada Kelompok Usaha bersama masih terbatas atau belum merata karena hanya sedikit kecamatan yang mendapatkan bantuan perahu fiber, seperti pada tahun 2020 hanya satu Kecamatan Padang Selatan yang mendapatkan

bantuan perahu fiber. Berdasarkan informasi dari ibu Zermaslia selaku staf Bidang Tangkap di Dinas Perikanan Kota Padang mengatakan bahwa

“Bantuan perahu fiber tersebut sesuai dengan permintaan nelayan kepada Dinas Perikanan Kota Padang, jika nelayan ingin mendapatkan bantuan perahu fiber nelayan harus mengajukan proposal ke Dinas Perikanan Kota Padang. Tetapi tidak semua KUB di Kota Padang mau mengajukan proposal ke Dinas Perikanan karena jika proposal yang diberikan tidak sesuai dengan tata cara pengajuan proposal maka nelayan tidak dapat menerima bantuan perahu fiber. Bantuan perahu fiber tersebut tidak selalu diberikan tiap tahun, hal tersebut juga terkendala karena anggaran yang di dapatkan oleh Dinas Perikanan.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan perahu fiber sesuai dengan permintaan nelayan. Dan pemberian perahu fiber tidak harus dilaksanakan tiap tahun karena tergantung anggaran yang didapatkan oleh Dinas Perikanan.

Bantuan yang diberikan Dinas Perikanan Kota Padang belum dapat meningkatkan pendapatan nelayan di Kota Padang. Berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara dengan bapak Adek yang merupakan salah satu anggota Robin Gaung menjelaskan bahwa

“Bantuan perahu fiber yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Padang ke KUB Robin Gaung belum mampu meningkatkan pendapatan nelayan karena KUB Robin Gaung hanya mendapatkan bantuan satu unit perahu fiber, hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah kami anggota KUB Robin Gaung. Jadi jika akan melaut kami akan bergantian menggunakan perahu fiber tersebut dan hasil yang di dapatkan tidak semua diberikan kepada anggota KUB Robin Gaung yang melaut dan hasil yang didapatkan tersebut harus ada dimasukan ke kas KUB.”

Dalam pemberian bantuan perahu fiber kepada nelayan masih kurang transparan karena tidak ada informasi yang memberikan bantuan perahu fiber kepada nelayan dan hanya KUB yang terdata pada Dinas Perikanan yang mendapatkan bantuan, sedangkan KUB yang belum terdaftar belum bisa mendapatkan bantuan perahu fiber, bukan hanya bantuan perahu fiber saja yang

tidak didapatkan oleh KUB yang belum terdata pada Dinas Perikanan tetapi semua jenis bantuan KUB yang belum terdata tidak mendapatkan bantuan.

Tujuan adanya bantuan perahu fiber ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tetapi masih banyak nelayan yang hidup dibawah lingkungan kemiskinan. Maka pelaksanaan bantuan perahu fiber ini masih belum tetap pelaksanaanya. Pemberdayaan nelayan yang dilakukan seharusnya mampu menjawab permasalahan yang di hadapi nelayan terkhusus di Gauang Kelurahan Gates Kota Padang Sumatera Barat, bukan menimbulkan permasalahan, oleh karena banyaknya permasalahan yang dihadapi nelayan dan tidak tepat pelaksanaan suatu pemberdayaan nelayan.

Berangkat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Efektivitas Pemberian Bantuan Perahu Fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan”.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pembagian bantuan perahu fiber yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Padang kepada Kelompok Usaha bersama masih terbatas atau belum merata
2. Bantuan perahu fiber belum dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
3. Nelayan masih belum memahami tata cara dalam pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan berupa perahu fiber

4. Pemberian bantuan perahu fiber kepada nelayan masih kurang transparan.
5. Bantuan perahu fiber ini belum meningkatkan kesejahteraan nelayan.

C. Pembatasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini dibatasi :

1. Bantuan perahu fiber belum dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
2. Nelayan masih belum memahami tata cara dalam pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan berupa perahu fiber

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan perahu fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang dalam rangka pemberdayaan nelayan?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas pemberian bantuan perahu fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang dalam rangka pemberdayaan nelayan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas pemberian bantuan perahu fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang dalam rangka pemberdayaan nelayan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas pemberian bantuan perahu fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang dalam rangka pemberdayaan nelayan

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya, Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perikanan, dapat sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk membuat program bantuan perahu fiber sesuai dengan kebutuhan nelayan.
- b. Bagi nelayan, dapat menggunakan bantuan tersebut agar tepat sasaran dan juga mempermudah nelayan dari segi alat untuk melaut karena diberikan bantuan perahu fiber.
- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP), Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Kebijakan

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan atautkah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan (Rosalina,2012:3).

Steers dalam Sutrisno (2011:123) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan:

- 1) Optimalisasi tujuan-tujuan, dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan, efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai dan optimal.
- 2) Perspektif sistem, sistem ini mencakup tiga komponen ialah *input*, proses dan *output*.

- 3) Tekanan pada segi perilaku manusia. Ancangan ini digunakan atas dasar kenyataan bahwa setiap dalam mencapai tujuan selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alat efektif.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam organisasi, kegiatan maupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan kemampuan dari organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta program atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam proses pelaksanaannya (Rosalina,2012:3). Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target atau tujuan dari suatu program bisa tercapai.

Menurut Zaidan (2013:188) efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas di ukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output , kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Handoko (2011:13) mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif.

Menurut Nawawi dalam Pasolong (2007:92) mengatakan bahwa program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama bersama masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa program merupakan suatu turunan dari sebuah kebijakan agar menimbulkan kemudahan dalam pencapaian tujuan dari kebijakan yang memerlukan kerjasama yang sistematis dan berkelanjutan diantara pelaku dan pelaksana kebijakan yang dalam hal ini merujuk kepada pemerintah, masyarakat dan organisasi terkait.

Kebijakan memiliki 5 unsur yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan efek atau dampak. Artinya, kebijakan haruslah mengandung tujuan, rencana, program, agar tercapai keputusan yang baik secara mayoritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Taufiqurohkman, 2014: 150).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:13) secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budi daya; pandai; mahir”. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan -an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian

di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu:

- 1) Pengambilan keputusan mesti di dasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut.
- 2) Pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.

Dye (dalam Taufiqurohman,2014:03) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Laswell (dalam Taufiqurohman,2014:150), memberi arti kebijakan sebagai “*a project program of goals, values and practise*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Efektivitas kebijakan merupakan keberhasilan implementasi suatu program kebijakan yang dapat dicapai secara tepat waktu.

2. Indikator Efektivitas

Menurut Nugroho (2012:107) indikator efektivitas kebijakan, yaitu:

a) Tepat Kebijakan.

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b) Tepat Pelaksanaan.

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

c) Tepat Target.

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

d) Tepat Lingkungan.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi

publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; *interpretive instution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Bersadarkan indikator yang diatas dapat dipahami bahwa indikator efektivitas adalah tepat kebijakan yaitu kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat, tepat pelaksanaan yaitu Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat, kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat, tepat target yaitu sasaran dari kebijakan tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, tetap lingkungan.

Ramdan (dalam ilham,2006:162) mengemukakan bahwa efektivitas dapat di ukur melalui beberapa indikator. Indikator efektivitas tersebut yakni adalah:

- 1) Efisiensi: suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya secara optimal. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila dalam proses pelaksanaanya kebijakan tersebut mampu memaksimalkan segala potensi sumber daya yang

ada sehingga kendala terhadap keterbatasan sumber daya dapat teratasi dan keberhasilan kebijakan dapat tetap tercapai.

- 2) Adil: Bobot kebijakan harus ditempatkan secara adil, yakni kepentingan publik tetap harus diutamakan dan dapat terdistribusi secara merata. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi unsur keadilan yakni tidak ada diskriminasi dan semua pihak dapat memperoleh dampak positif dari yang diharapkan, dengan kata lain output kebijakan dapat terdistribusikan dan dirasakan secara merata oleh semua masyarakat.
- 3) Mengarah kepada insentif (kebaikan): yaitu suatu kebijakan harus mengarah dan merangsang kepada tindakan dalam perbaikan dan peningkatan yang diharapkan. Oleh karena itu suatu kebijakan apabila bertujuan untuk memecahkan masalah maka kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan bentuk masalah baru. Serta tujuan kebijakan yang diharapkan dan tentunya tujuan tersebut mengarah kepada kebaikan dapat dikatakan efektif apabila kebaikan yang diinginkan dapat tercapai.
- 4) Diterima oleh publik: yakni kebijak publik diperuntukan untuk kepentingan publik. Oleh karena kebijakan yang baik harus dapat diterima oleh publik. Karena belum tentu suatu kebijakan dapat diterima oleh publik, seringkali kebijakan gagal dilaksanakan karena ada perlawanan dari publik yang tidak memberi keuntungan pada kelompok sasaran.

5) Moral: suatu kebijakan harus dilandasi dengan moral yang baik. Karena pada dasarnya suatu kebijakan belum tentu bijaksana. Sebagai contoh kebijakan penggusuran pemukiman liar dimana pemerintah tidak hanya serta merta menggusur tanpa menghiraukan moral kemanusiaan yang diakibatkan. Sehingga pemerintah ketika melakukan penggusuran tetap memberi tanggung jawab atas dasar moral kemanusiaan yakni berupa pemberian ganti rugi atau pemindahan hunian ke tempat lain

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Ada empat faktor kritis (*four critical factor*) yang mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang berinteraksi satu sama lain dan membentuk pola-pola tertentu Edward III (dalam Yuzaria,2011:10). Menurut Edwards III (dalam Yuzaria,2011:10) meskipun aspek komunikasi telah berjalan baik, akan tetapi bila tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya finansial merupakan hal pokok dalam proses implementasi. Lemahnya sumberdaya finansial menghambat proses implementasi. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya sumberdaya finansial ini adalah:

- a. Keterbatasan pemerintah dalam mendapatkan anggaran untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan karena terbatasnya sumber-sumber yang dimiliki.

- b. Faktor politis yang lebih banyak membiayai pembangunan fisik, fasilitas pendidikan dan kesehatan,
- c. Faktor manajerial dari aparaturnya yang menangani anggaran dalam menyusun rencana anggaran dan kemampuan meyakinkan pembuat keputusan.

Horn dalam (Yuzaria,2011:10) memperkenalkan model implementasi dengan enam komponen basis yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Tujuan dan ukuran kebijakan.
- 2) Sumber-sumber kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana.
- 4) Karakteristik pelaksana, hal ini yang tidak terlepas dari struktur birokrasi.
- 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang berpengaruh terhadap variabel lingkungan dan keberhasilan pencapaian hasil.
- 6) Kecenderungan pelaksana, pengalaman individu sangat berperan dalam menginterpretasikan kebijakan.

Dari teori atau pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas maka teori dan indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori dan indikator efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho karena teori dan indikator efektivitas ini lebih tepat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemberian bantuan perahu

fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang dalam rangka pemberdayaan nelayan.

4.Perahu Fiber

a) Pengertian perahu fiber

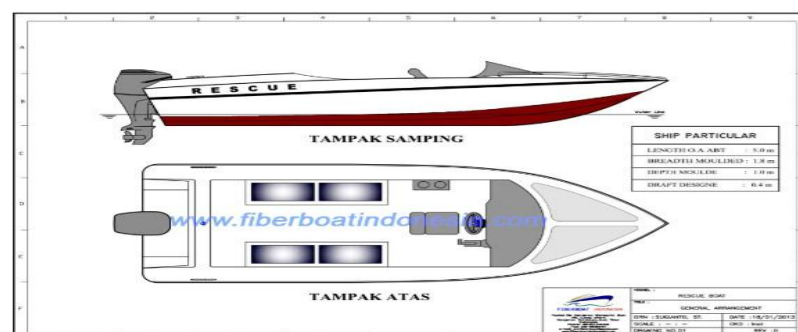
Perkembangan teknologi khususnya pembuatan perahu dengan bahan fiberglass terus mengalami kemajuan seiring dengan terus ditemukannya teknologi paling baru serta bahan-bahan atau komponen-komponen pendukung yang semakin beragam pula yang memiliki daya tahan serta kualitas yang juga semakin baik. Salah satu teknologi paling baru dalam hal pembuatan perahu dengan bahan fiber. Perahu fiber adalah jenis kapal cepat, dan sangat cocok untuk digunakan sebagai kapal Patroli, perahu pribadi, atau perahu untuk sarana transportasi laut atau sungai (Wolok,2016:13)

b) Spesifikasi perahu fiber

Spesifikasi perahu fiber menurut Wolok (2016:15) :

- 1) Dilihat dari berat konstruksi, perahu fiber merupakan perahu yang paling ringan jika dibandingkan dengan perahu dengan bahan material kayu. sehingga kerja dari motor atau mesin penggerak baling baling pendorong atau kipas dapat bekerja secara maksimal.
- 2) Perahu fiber memiliki berat dibawah 5 GT.
- 3) Dilihat dari kekuatannya maka perahu fiber mempunyai kekuatan konstruksi yang cukup kuat.

- 4) Dilihat dari ketahanan materialnya pada air laut maka perahu fiber memberikan hasil yang sangat baik
- 5) Permukaan luar perahu fiber lebih licin dibandingkan dengan perahu jenis lain, yang berarti koefisien gesek dengan air akan lebih kecil. Sehingga pada model/bentuk perahu, ukuran dan daya mesin yang sama tentunya perahu fiber akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi.
- 6) Perahu fiber lebih tahan terhadap proses pelapukan sehingga usia atau masa pakai perahu fiber lebih lama.



Gambar 1. Rancangan Perahu Fiber

C) Kegunaan Perahu Fiber.

Kegunaan perahu fiber menurut Manik (dalam Wolok,2016:37-41)

- 1) Perahu fiber digunakan sebagai sarana untuk menangkap ikan.
- 2) Perahu fiber digunakan sebagai sarana untuk wisata.

Perahu wisata adalah merupakan kapal yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan pariwisata para wisatawan (Manik.2012). Berarti perahu fiber didesain sebagus mungkin dan menarik dan juga disediakan

kursi yang bisa dibuka dan dipasangkan kembali diperahu fiber tersebut, sehingga penumpang wisata merasakan kenikmatan dalam wisatanya.

5.Peran Dinas Perikanan dalam Pemberian Bantuan Perahu Fiber

Menurut Narwoko dan Suyanto dalam Suyanto . (2006:160) menyebutkan bahwa : peran adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instant. Sebagai proses, peran mempunyai empat tahapan yaitu :

- a) Memberi arahan pada proses sosialisasi.
- b) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
- d) Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran Dinas Perikanan dalam pemberian bantuan perahu fiber (Anggraini,2019:26):

1. Fasilitator atau penyedia yang menyalurkan bantuan baik berupa alat tangkap maupun perahu fiber.
2. Peran Dinas Perikanan sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh nelayan,

3. Dinas Perikanan berperan dalam sarana produksi yang dibutuhkan masyarakat nelayan. Pemberian bantuan sarana operasional, pembinaan kelompok nelayan.
4. Pembinaan, memberikan pembinaan kepada nelayan yang mendapatkan perahu fiber agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
5. Pengawas terhadap berjalanya program bantuan perahu fiber.

6. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto,dkk (2015:28) pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya. Dalam pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain:

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecikupan pangan
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan ksehaan)

- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- 4) Terjaminya keamanan
- 5) Terjaminya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Menurut Suhendra (2006:74) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat serta memungkinkan masyarakat yang belum mampu menjadi masyarakat yang mampu dan lebih mandiri dan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Rappaport dalam Mardikanto dan Poerwoko (2015 : 29) ialah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Maka dapat dipahami pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dalam upaya memperkuat “*Community self Reliance*” atau kemandirian komunitas. Pada proses pemberdayaan tersebut, masyarakat didampingi baik saat menganalisis masalah yang dihadapi maupun dibantu agar menemukan alternatif solusi masalah tersebut. Kemudian akan diperlihatkan beragam pendekatan atau strategi menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai. Artinya, dalam upaya memberdayakan masyarakat ada pihak yang memberikan

rangsangan atau kekuatan (*empowerment*) untuk mencapai maksud tersebut.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat menurut Theresia,dkk (2014:119-121) dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia maupun masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya membagikan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Ketiga, melindungi dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat serta memungkinkan masyarakat yang belum mampu menjadi masyarakat yang mampu dan lebih mandiri. Dan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan

b. Tahap-tahap pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004:82-84) proses pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahapan yang harus dilalui tersebut adalah:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya pada saat itu, dengan demikian masyarakat akan lebih terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisinya.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang

diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat perlu melakukan tahapan penyadaran, transformasi kemampuan sehingga masyarakat dapat mengambil peran di dalam pembangunan serta tahapan meningkatkan kemampuan intelektual yang mengantarkan masyarakat tersebut pada kemandirian.

Menurut pendapat Mardikanto,dkk (2015 : 125-127) tahapan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- 1) Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

- 2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat, yang tujuannya untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

- 3) Proses pemberdayaan masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok
- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus dan secara partisipatif.

4) Pemandirian masyarakat

Arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Berdasarkan pendapat Mardikanto di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pemberdayaan haruslah mengenali kondisi daerah yang menjadi tempat pemberdayaan, dengan mengenali kondisi daerah maka akan mengetahui apa yang dibutuhkan daerah tersebut sehingga proses pemberdayaan bisa berjalan dengan efektif, kemudian di dalam proses pemberdayaan sangat penting mensosialisasikannya kepada masyarakat tujuannya untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang akan dilaksanakan, di dalam melakukan pemberdayaan yang melalui berbagai proses memiliki arah

tujuan untuk memandirikan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengelola sendiri kegiatannya

c. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Dahama dan Bahtanar dalam Mardikanto (2015:106-108) bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat mencakup:

- 1) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- 3) Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan hanya selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawarkan setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
- 7) Belajar sambil bekerja, artinya kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
- 8) Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya) sasarannya.
- 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
- 10) Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh haruslah benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
- 11) Segenap keluarga, artinya penyuluh haruslah memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan unit sosial.
- 12) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

Berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan diatas dapat ditegaskan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang digunakan agar suksesnya kegiatan

pemberdayaan yaitu prinsip minat dan kebutuhan, organisasi masyarakat bawah, keragaman budaya, perubahan budaya, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dalam penerapan ilmu, belajar sambil bekerja, menggunakan metoda yang sesuai, kepemimpinan, spesialis yang terlatih, segenap keluarga, kepuasan.

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Mardikanto (2013:111) tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan yang dilakukan adalah: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya perbaikan itu di antaranya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), berbekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

- 4) Perbaiki kelembagaan (*better institution*), perbaikan tindakan yang dilakukan mampu memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 5) Perbaiki usaha (*better business*).
- 6) Perbaiki pendapatan (*better income*), perbaikan pendapatan diharapkan mampu memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 7) Perbaiki lingkungan (*better environment*), kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 8) Perbaiki kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaiki masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Berdasarkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi. Baik di sisi ekonomi maupun bersifat sosial seperti kepercayaan diri, dan sebagainya.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:167) yaitu:

1. Strategi sebagai suatu rencana
2. Strategi sebagai kegiatan
3. Strategi sebagai suatu instrumen
4. Strategi sebagai sistem
5. Strategi sebagai pola pikir

Menurut Hikmat (2006:35) strategi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan strategi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah

suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan.

f. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2013:113) upaya dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yakni:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Yang titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai penyediaan masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- 3) Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Melindungi dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan bukan untuk membuat masyarakat menjadi semakin bergantung pada berbagai program pemberian. Melainkan

menjadikan mereka berkuasa atas diri mereka dan mampu menepis tekanan dari yang lebih kuat.

B. Penelitian yang relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Karmilawati,dkk (2019), yang berjudul “Masyarakat Nelayan Kampung Sicini Arungkeke, Jeneponto 2014-2017”. Penelitian ini menjelaskan bahwa masuknya modernisasi perahu yang dikenal dengan perahu fiber yang perkembangannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan penelitian ini juga menjelaskan perawatan perahu fiber. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas tentang bantuan perahu fiber yang diberikan oleh Dinas Perikanan.
2. Penelitian Ardhy, Sani,dkk (2017), yang berjudul “Perawatan Kapal Nelayan Material Fiberglass di Kota Padang”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perawatan dari perahu nelayan yang terbuat dari fiber, sedangkan penelitian peneliti kepada penggunaan perahu fiber. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama meneliti tentang perahu yang bermaterial fiber.
3. Penelitian Fitriadi,dkk (2018) yang berjudul “Teknologi Terapan Perahu Fiberglass Untuk Nelayan Sungai Kluet Kabupaten Aceh Selatan”. Penelitian ini berfokus pada perubahan penggunaan material perahu dari kayu ke fiberglass sehingga dapat dihasilkan perahu yang murah, dan

tahan lama dari serangan rayap. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada efektivitas pemberian bantuan perahu fiber kepada nelayan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas penggunaan perahu fiber.

4. Penelitian Ikram,dkk (2017) yang berjudul “Peningkatan Mutu Pembuatan Perahu Fiberglass Kelompok Nelayan Kuri Ca’Di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Teknologi fiberglass sudah lama dikenal oleh masyarakat, namun pemanfaatanya oleh nelayan Kabupaten Maros belum optimal. Oleh karena adanya program penerapan teknologi komposit fiberglass yang bisa digunakan untuk meningkatkan mutu sebuah perahu fiber yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada bantuan perahu fiber. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama meneliti tentang perahu fiber.
5. Penelitian Yulianto,Eko,dkk (2013) yang berjudul “Desain Perahu Fiberglass Bantuan LPPM IPB di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi”. Penelitian ini menjelaskan keadaan perahu nelayan Cikahuripan sebagian besar sudah tua dan tidak layak untuk dipakai. Maka untuk pembuatan perahu yang baru nelayan menggunakan perahu yang berbahan dasar fiber dan menggunakan desain perahu fiber dari Cilacap. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada penggunaan perahu fiber. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama meneliti perahu yang terbuat dari material fiber.

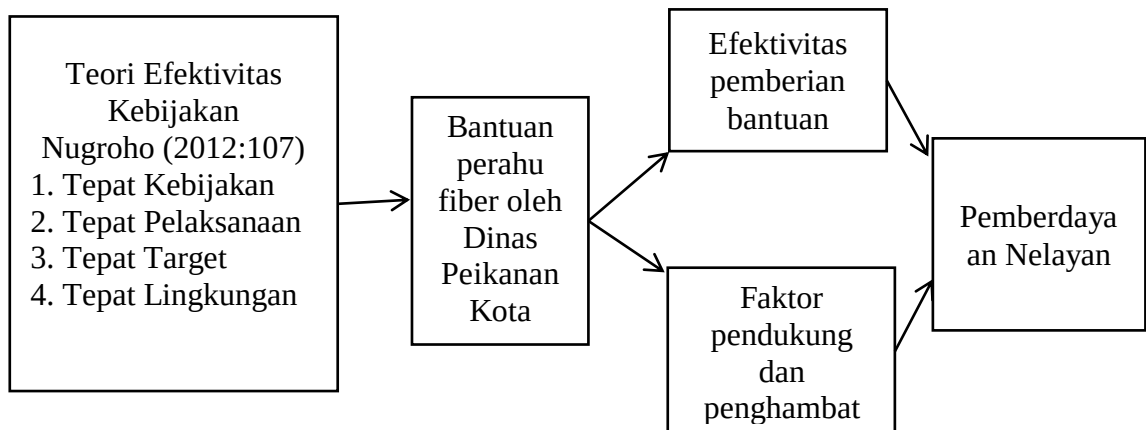
6. Penelitian Zxjiang,dkk (2010) yang berjudul “*Fibrication of Superhydrophobic 3-D Braided Carbon Fiber Fabric Boat*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perahu fiber dibuat dengan kombinasi kasar skala makro dan perawatan materialnya dapat menggunakan energi dengan permukaan rendah. Bobot beban tertingginya 14,80 gram, hal ini membuat perahu fiber memiliki kapasitas yang baik dengan bobot muatan tinggi sehingga perahu fiber cocok digunakan pada banyak aktivitas nelayan. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada penggunaan perahu fiber. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama meneliti sejauh mana spesifikasi yang dimiliki oleh perahu fiber dalam rangka menunjang efektivitas perahu fiber dalam rangka memberdayakan nelayan.
7. Penelitian Juan C.Surl, dkk (2003) yang berjudul “*Effectiveness of the structural fisheries policy in the European Union*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan struktural masyarakat pada sektor perikanan dengan membandingkan tingkat kelayakan ekonomi terhadap mekanisme yang telah ditetapkan, penelitian ini menganalisis kebijakan dalam rangka menurunkan kapasitas penangkapan ikan dan harapan terhadap pencapaian hasil yang tinggi dalam perikanan. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada efektivitas kebijakan perahu fiber dalam rangka pemberdayaan nelayan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas

kebijakan dalam bidang perikanan dalam rangka mensejahterahkan nelayan.

8. Penelitian Minilo,dkk. (2020) yang berjudul “*Design Of Nautical Cleat For Small-Medium Boats Using Hybrid Curaua-Glass Fiber-Reinforced Epoxy*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa spesifikasi yang dimiliki oleh perahu fiber yang bahanya terdi dari serat, yang dirancang untuk memudahkan agar komponennya tahan air. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada efektivitas pemberian bantuan perahu fiber kepada nelayan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dengan peneliti penulis adalah sama meneliti tentang perahu fiber.

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana efektivitas pemberian bantuan perahu fiber oleh Dinas Perikanan Kota Padang dalam rangka pemberdayaan nelayan. Secara sederhana, kerangka konseptual yang penulis gambarkan adalah sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas Pemberian bantuan perahu fiber dalam rangka pemberdayaan nelayan

Tepat kebijakan belum terlaksana dengan baik karena bantuan perahu fiber yang diberikan oleh Dinas Perikanan memiliki jumlah perahu yang diberikan sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya anggota kelompok. tepat pelaksanaan belum terlaksana dengan baik karena untuk mendapatkan bantuan perlu ditentukan siapa yang mendapatkan bantuan dan apa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan perahu fiber ini agar kegiatan pemberdayaan ini dirasa tepat pelaksana, dengan syarat tersebut menyulitkan nelayan yang tidak mengerti dengan prosedur dalam pengajuan proposal. Tepat target belum terlaksana dengan baik karena ada KUB yang menjual bantuan perahu fiber yang diberikan oleh Dinas Perikanan sehingga diperlukanya sikap lebih selektif dari Dinas Perikanan untuk KUB penerimaan bantuan perahu fiber berikutnya. Nelayan di Gaung memberikan keluhan mengenai spesifikasi perahu fiber yang diterima oleh nelayan kurang sesuai dengan lingkungan yang ada, karena ombak yang cenderung besar maka nelayan tidak dapat melaut menggunakan perahu yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan dan perahu hanya dapat digunakan oleh nelayan ketika cuaca sedang baik.

2. Faktor penghambat dan pendukung pemberian bantuan perahu fiber

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward dalam Ramadhani, dkk (2021:782) untuk melihat faktor pendukung dan faktor penghambat pemberian bantuan perahu fiber sebagai berikut: 1) faktor komunikasi, Salah satu faktor pendukung untuk efektivitas perahu fiber ini yaitu, faktor komunikasi. Faktor komunikasi perlu berjalan dengan baik karena komunikasi menjadi jembatan perantara antara pemerintah dengan masyarakat yang menerima bantuan. Dalam pemberian bantuan perahu fiber yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Padang diperlukan komunikasi yang baik antara Dinas Perikanan dengan nelayan karena untuk membangun komunikasi dengan nelayan masih sulit dilakukan. 2) Sumber daya, Dinas Perikanan memberikan dukungan kepada nelayan agar memiliki kehidupan yang lebih sejahtera berupa pemberian bantuan perahu fiber yang dapat digunakan oleh nelayan untuk melaut. Anggota KUB sangat terbantu dengan adanya bantuan perahu fiber, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemberian bantuan perahu fiber tersebut. 3) Sikap pelaksana, Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

B. SARAN

1. Diharapkan pemberian bantuan perahu fiber dilakuan secara merata kepada seluruh anggota KUB yang ada di Kota Padang.
2. Nelayan harus tergabung dalam kelompok usaha bersama agar adanya peraturan yang kuat terhadap nelayan penerima bantuan.
3. Pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Padang harus lebih maksimal, dengan melihat semua keluhan nelayan yang ada di lapangan dan dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan bantuan yang akan diberikan

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari Buku

Aprillia Theresia, dkk.2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung:Alfabeta.

Kurnia, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Hal 107.

K. Suhendra.2006.*Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia Press.

Nugroho, Riant.2012. *Public Policy*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

Sulistiyani, A. T.2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sutrisno, E. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

Totok, Mardikanto, dkk.2015.*Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Wolok, Eduart,dkk. 2016. *Perahu Tradisional Katinting*. Gorontalo:Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo.

Zaidan, N. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Acuan dari Jurnal

Anggraini, Lia. 2019. “Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan Di Perairan Danau

- Singkarak”. *Journal of Education on Social Science*. Vol. 3. No. 1. Hal 28-29.
- Ardhy, Sanny,dkk.2017, “Perawatan Kapal Nelayan Material Fiberglass di Kota Padang”. *Jurnal Sistem Mekanik dan Termal*. VOL. 01 NO. 02. Hal. 143-145.
- Fitriadi, Nuruli,dkk. 2018. “Teknologi Terapan Perahu Fiberglass Untuk Nelayan Sungai Kluet Kabupaten Aceh Selatan”. *Jurnal Cakrawala Maritim*. p-ISSN : 2620-5637. Hal.1-3.
- Ilham, Nyak, dkk. 2006. “Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan”. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol 4. No 2. Hal 157-160.
- Ikram,dkk. 2017. “Peningkatan Mutu Pembuatan Perahu Fiberglass Kelompok Nelayan Kuri Ca’Di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros”. *SNP2M*. Hal 156-159.
- Juan, dkk. 2003. “Effectiveness of the structural fisheries policy in the European Union”. *Juornal Science Direct Marine Policy*. Vol 27. Page 535-544.
- Karjuni, Dt. Maani. 2011. "Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Demokrasi Vol.X No. 1* . Hlm 55-63.
- Karmilawati,dkk. 2019. “Masyarakat Nelayan Kampung Sicini Arungkeke, Jeneponto 2014-2017”. *Jurnal Pattingalloang*. Vol 6. No 2. Hal 111-122.
- Minilo,dkk. 2020.“Design Of Nautical Cleat For Small-Medium Boats Using Hybrid Curaua-Glass Fiber-Reinforced Epoxy”. *Juornal Elsevier. Materials studay*. Vol xxxx.
- Rosalina, Iga. 2016. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren

- Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 01.No. 01. Hal 3.
- Yulianto, Eko, dkk. 2013. “Desain Perahu *Fiberglass* Bantuan LPPM IPB di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi”. Buletin PSP. Vol. 21. No. 1. Hal 31-35
- Yuzaria,dkk. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Impor Sapi Potong Di Provinsi Jawa Barat”. Jurnal Peternakan Indonesia. Vol. 13. No.1. Hal 10-11.
- Zxjiang,dkk. 2010. “Fibrication of Superhydrophobic 3-D Braided Carbon Fiber Fabric Boat”. Juornal Elsevier. Materials letters. Vol 64. Page 2441-2443.